

## ABSTRAK

Anisya Iqlima Hanifa Manangkalani, 12103173021, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk), Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, IAIN Tulungagung, 2021, Pembimbing: Prof. Dr. H. Hasyim Nawawi, S.H., M.Si

**Kata Kunci:** Pemberdayaan Masyarakat, Pencegahan, Narkotika.

Penelitian ini dilatar belakang oleh permasalahan yang mengkhawatirkan, yakni meningkatnya jumlah kasus penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Nganjuk. Peningkatan ini mengindikasikan perlunya pendekatan baru yang lebih holistik dan berkelanjutan dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika. Salah satu pendekatan yang dianggap efektif adalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika adalah isu yang memiliki relevansi signifikan dalam upaya menjaga kesejahteraan sosial dan kesehatan masyarakat. Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah serius yang merusak individu, keluarga, dan masyarakat secara luas. Di tengah meningkatnya prevalensi penyalahgunaan narkotika, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk menjadi entitas penting dalam upaya mengatasi permasalahan ini.

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk? 2) Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk Dalam Prespektif Perpres Nomor 23 Tahun 2010? 3) Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk Dalam Prespektif Fiqih Siyasah?

Adapun metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif dan jenis penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Pada teknik analisis data, penulis menggunakan kondensasi data dan analisis data. Sedangkan pengecekan keabsahan data, penulis menggunakan perpanjangan keabsahan data, triangulasi digunakan untuk pengecekan keabsahan data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Nganjuk menerapkan beberapa tahapan, yaitu dengan (a) memetakan masyarakat menjadi empat lingkungan (lingkungan pemerintahan, lingkungan Perusahaan swasta, lingkungan masyarakat, dan lingkungan pendidikan), (b) menentukan sasaran instansi, (c) menentukan tiga hal pokok dalam pemberdayaan masyarakat, (d) penguatan Pegiat oleh BNN Nganjuk, dan (e) Program Pemberdayaan masyarakat. Semua tahapan tersebut diharapkan bisa menumbuhkan rasa

kesadaran masyarakat menjauhi narkoba dan menjaga lingkungan tetap sehat dengan cara bebas narkoba. 2) Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Nganjuk selaras dengan isi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. Dimana BNN Nganjuk telah memberdayakan masyarakat untuk ikut andil dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Selain itu BNN Nganjuk menentukan program apa saja yang akan diselenggarakan demi terealisasinya pemberdayaan masyarakat. Hal yang dilakukan oleh BNN Nganjuk dengan memetakan lingkungan sosial masyarakat telah sesuai dengan Bagian kelima Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. 3) Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan Narkoba di Badan narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk berlandaskan pada hukum yang berlaku di Indonesia, sedangkan hukum Islam memiliki hukumnya sendiri bagi orang pengguna narkoba. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba yang digalangkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupten Nganjuk termasuk dalam tindakan menjalankan syariat Islam. Yaitu sesuai dengan ‘Amar Ma’ruf Nahi Mungkar yang artinya menyeru kepada kebaikan dan melarang pada keburukan. Sehingga tindakan yang dilakukan oleh BNN Nganjuk ini telah sesuai dengan syariat Islam.

## Abstract

Anisya Iqlima Hanifa Manangkalani, 12103173021, Community Empowerment in Preventing Narcotics Abuse (Studies at the Nganjuk Regency National Narcotics Agency), Department of Constitutional Law, Faculty of Sharia and Legal Sciences, IAIN Tulungagung, 2021, Supervisor: Prof. Dr. H. Hasyim Nawawi, S.H., M.Si

**Keywords:** Community Empowerment, Prevention, Narcotics.

This research is motivated by an alarming problem, namely the increasing number of narcotics abuse cases in Nganjuk Regency. This increase indicates the need for a new, more holistic and sustainable approach in preventing narcotics abuse. One approach that is considered effective is community empowerment. Community empowerment in preventing narcotics abuse is an issue that has significant relevance in efforts to maintain social welfare and public health. Narcotics abuse is a serious problem that damages individuals, families and society at large. In the midst of the increasing prevalence of narcotics abuse, the Nganjuk Regency National Narcotics Agency has become an important entity in efforts to overcome this problem.

The problem formulation in this research is: 1) How is Community Empowerment in Preventing Narcotics Abuse at the Nganjuk Regency National Narcotics Agency? 2) How is Community Empowerment in Preventing Narcotics Abuse at the Nganjuk Regency National Narcotics Agency in the Perspective of Presidential Decree Number 23 of 2010? 3) How is Community Empowerment in Preventing Narcotics Abuse at the Nganjuk Regency National Narcotics Agency in the Siyasah Fiqh Perspective?

The research methods used by researchers are qualitative methods and field research. The data collection techniques used in this research are in-depth interviews, observation and documentation. In data analysis techniques, the author uses data condensation and data analysis. While checking the validity of the data, the author uses an extension of the validity of the data, triangulation is used to check the validity of the data.

The results of this research show that: 1) Community empowerment in preventing narcotics abuse at the Nganjuk National Narcotics Agency applies several stages, namely by (a) mapping the community into four environments (government environment, private company environment, community environment, and educational environment), (b) determining agency targets, (c) determining three main things in community empowerment, (d) strengthening Activists by BNN Nganjuk, and (e) Community Empowerment Program. It is hoped that all these stages can raise a sense of public awareness of staying away from narcotics and keeping the environment healthy in a narcotics-free manner. 2) Community empowerment carried out by the Nganjuk National Narcotics Agency is in line with the contents of Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 23 of 2010 concerning the National Narcotics Agency. Where BNN Nganjuk has empowered the community to take part in efforts to prevent narcotics

abuse. Apart from that, BNN Nganjuk determines what programs will be held for the realization of community empowerment. What BNN Nganjuk has done by mapping the social environment of the community is in accordance with Part Five of the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 23 of 2010 concerning the National Narcotics Agency. 3) Community empowerment in preventing narcotics abuse at the Nganjuk Regency National Narcotics Agency is based on the laws in force in Indonesia, while Islamic law has its own laws for people who use narcotics. Community empowerment in preventing narcotics abuse promoted by the Nganjuk Regency National Narcotics Agency is included in the implementation of Islamic law. This is in accordance with 'Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, which means calling for good and forbidding evil. So the actions taken by BNN Nganjuk are in accordance with Islamic law.